

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK

23 September 2019 Indeks: ASA 21/1070/2019

INDONESIA: PIHAK BERWENANG HARUS SEGERA MENANGANI SERANGAN TERHADAP STAFF KPK

Amnesty International mendorong pihak berwenang Indonesia untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengakhiri serangan terhadap staf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suatu badan negara yang bertugas untuk memerangi korupsi. Serangan terakhir terjadi pada 13 September 2019 di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, ketika sekitar seratus orang berusaha untuk menerobos masuk ke dalam Gedung tersebut. Para penyerang itu melemparkan batu, memukuli personel keamanan KPK- sedemikian parah sehingga ada yang harus dirawat di rumah sakit - dan merusak peralatan kerja seorang jurnalis.

Para petugas polisi di lapangan gagal mengambil tindakan yang memadai untuk menghentikan serangan masa dan sampai sekarang polisi belum menahan atau menyebutkan nama-nama tersangka penyerangan ini. Yang paling mengkhawatirkan, serangan di bulan September ini hanyalah yang terakhir dari serangkaian insiden selama beberapa tahun terakhir yang melibatkan serangan fisik, ancaman, dan intimidasi terhadap staf KPK, terutama terhadap penyidik senior dan para komisionernya (yang dirujuk sebagai pimpinan KPK). Sampai sekarang belum ada pertanggungjawaban terhadap semua kejadian tersebut. Kegagalan pemerintah yang terus menerus terjadi untuk menangani pelecehan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap para pejabat anti korupsi menghalangi perjuangan negara ini melawan korupsi, suatu fenomena yang mengurangi sumber daya negara yang dibutuhkannya untuk menghormati, melindungi memajukan, dan memenuhi berbagai hak asasi manusia.

Latar belakang dari serangan yang terbaru ini mengesankan bahwa serangan tersebut bermotif politik. Dalam beberapa minggu terakhir, hampir semua staf KPK yang menjadi anggota Wadah Pegawai KPK (WP KPK) melakukan serangkaian kegiatan protes simbolis di kantor mereka, dengan juga didukung oleh beberapa anggota manajemen KPK. Kegiatan-kegiatan protes tersebut, yang dilakukan guna menarik perhatian masyarakat kepada perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses seleksi pemimpin senior KPK- suatu proses yang juga dikritik oleh para aktivis anti-korupsi- dan juga usulan amandemen terhadap UU Anti Korupsi yang menurut para aktivis anti korupsi akan melemahkan sebagian mandat KPK dan kemandirian Komisi tersebut. Salah satu kegiatan protes tersebut berbentuk menutupi logo KPK di gerbang masuk Gedung Merah Putih dengan selebar besar kain hitam. Kegiatan-kegiatan protes ini tidak hanya didukung secara luas oleh organisasi masyarakat sipil, mereka juga didukung oleh masyarakat yang menunjukkan solidaritas mereka dengan ikut serta dalam demonstrasi damai, menempatkan karangan bunga di sekitar Gedung KPK dan bentuk-bentuk dukungan simbolis lainnya.

Pada 13 September 2019 sekitar pukul 2 siang, kira-kira seratus orang mengorganisir demonstrasi tandingan di depan Gedung KPK. Awalnya mereka dan para anggota WP KPK terpisahkan pagar besi, dan para demonstran tandingan tersebut hanya melakukan orasi yang mengkritik WP KPK, mendukung komisioner-komisioner KPK yang baru saja terpilih, dan menerima amandemen baru UU Anti Korupsi. Mereka kemudian mulai membakar karangan-karangan bunga di dekat mereka sembari berteriak menyuruh para anggota WP KPK untuk menyingkirkan kain hitam yang menutupi logo KPK. Saat itu terdapat 40 petugas polisi di tempat kejadian dan mereka juga meminta para anggota WP KPK untuk membuka kain hitam tersebut dan ketika pada pukul 4 sore salah satu dari masa demonstrasi tandingan mulai memanjat pagar besi Gedung KPK, petugas-petugas polisi tersebut tidak mengambil tindakan apa pun.

AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK

Setelah orang pertama memanjat pagar tersebut, para demonstran tandingan lainnya ikut serta dan masa berusaha untuk masuk ke lobi Gedung. Personil keamanan KPK berusaha untuk menghalangi masa dan akhirnya dipukuli dengan cukup parah. Beberapa orang dari masa penyerang memukuli petugas keamanan internal KPK sebegitu parahnya ia harus dirawat di rumah sakit. Lebih jauh lagi, para demonstran tandingan itu melemparkan batu dan petasan ke arah Gedung dan menghancurkan peralatan yang dimiliki seorang jurnalis.

Salah seorang staf Amnesty International Indonesia sedang berada di dalam Gedung KPK saat serangan terjadi dan dapat mengamati respon polisi. Ia mencatat bahwa para petugas polisi di tempat kejadian melakukan sangat sedikit tindakan untuk mencegah masa dari memasuki Gedung ataupun untuk meredakan kekerasan masa tersebut. Ditambah lagi, polisi sampai sekarang belum juga menahan atau mengumumkan nama tersangka yang bertanggungjawab atas insiden tersebut.

Tiada tanggapan polisi yang memadai terhadap kejadian tersebut adalah bagian dari suatu pola yang lebih besar. Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi sejumlah kejadian serangan, intimidasi, dan ancaman terhadap para penyidik KPK yang telah terjadi tanpa ditanggapi polisi. Pada April 2017 misalnya, penyidik KPK Novel Baswedan disiram wajahnya dengan asam hidroklorida oleh dua laki-laki yang mengendarai satu motor saat ia sedang berjalan pulang dari masjid setelah usai menunaikan Shalat subuh. Saat ia diserang Novel adalah ketua WP KPK dan seseorang yang mengkritik usaha berbagai pihak untuk menugaskan lebih banyak petugas polisi sebagai penyidik KPK. Novel juga saat itu sedang memimpin penyidikan tentang penyelewengan dana proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, suatu kasus yang melibatkan beberapa pejabat tinggi pemerintah dan anggota DPR. Pada waktu yang sama ia sedang menghadapi tekanan dari kepolisian karena penyidikan kasus terpisah yang sedang dilakukan oleh tim KPK yang lain yang melibatkan tuduhan bahwa seorang Jenderal Polisi telah menerima suap.

Pada hari yang sama di Januari 2019, dua komisioner KPK- Agus Rahardjo dan Laode Syarief- diserang dengan menggunakan kekerasan. Seseorang menggantungkan suatu alat mirip bom pipa yang terbungkus kantong plastik di pagar rumah Agus, sementara rumah Laode dilempari bom Molotov.

Sampai saat ini, tidak ada satu pun tersangka yang telah ditahan untuk serangan-serangan terhadap penyidik dan komisioner KPK tersebut walaupun polisi mengklaim bahwa mereka telah menugaskan berbagai tim penyidik untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut.

Beberapa staf KPK telah memberitahu Amnesty International bahwa selain kasus-kasus tersebut di atas, penyidik-penyidik KPK lainnya juga telah menerima intimidasi dan ancaman ketika menyelidiki kasus-kasus yang melibatkan perwira polisi berpangkat tinggi, dalam beberapa kejadian intimidasi dan ancaman tersebut dilakukan oleh petugas-petugas polisi

Pejabat dan aktivis anti korupsi, sebagaimana juga pembela hak asasi manusia di Indonesia, telah lama menjadi korban ancaman dan serangan, yang mana hampir semua kejadian semacam itu pada akhirnya tidak terselesaikan dan tidak ada pertanggungjawaban. Jelas bahwa pihak berwenang harus mengambil tindakan yang tegas guna mengakhiri masalah impunitas dan memastikan bahwa para petugas dan aktivis anti korupsi dapat melakukan kerja mereka yang penting dan diperlukan tersebut, sementara pada waktu yang sama menghormati hak-hak mereka yang dituduh terlibat dalam korupsi. Kurangnya kemajuan dalam menangani serangan-serangan tersebut merupakan noda hitam dalam usaha Indonesia untuk mengatasi korupsi, menjalankan tata kelola yang baik, dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini juga semakin jauh memperkuat budaya impunitas terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, yang sendirinya merupakan ancaman terhadap supremasi hukum di negara ini.